

SKRIPSI

**KONTRIBUSI PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) TERHADAP
ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH (APBD)
KABUPATEN SINJAI**

**ASSIR ARAFAH
105 710 1867 12**



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
MAKASSAR 2018**

KONTRIBUSI PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) TERHADAP

ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH (APBD)

KABUPATEN SINJAI

by

ASSIR ARAFAH

105 710 1867 12

Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Pada Jurusan

Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan



FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

MAKASSAR 2018



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Gedung Iqra Lt.7 Tel. (0411) 866 972 Makassar

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN

Judul Penelitian : "Kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sinjai".
Nama Mahasiswa : Assir Arafah
No Stambuk/NIM : 105710186712
Program Studi : Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan (IESP)
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Jenjang Studi : Strata Satu (S1)
Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Makassar

Menyatakan bahwa skripsi ini telah diteliti, diperiksa dan diujikan di depan panitia penguji skripsi Strata Satu (S1) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar pada hari Sabtu tanggal 17 Oktober 2018.

Makassar, 17 Oktober 2018

Disetujui Oleh :

Pembimbing I,

HJ. Naidah, SE., M.Si.
NBM: 710 561

Pembimbing II,

Faidul Adziem, SE., M.Si
NIDN: 092 1018002

Diketahui :

Dekan,
Fakultas Ekonomi & Bisnis
Unismuh Makassar



Ismail Rasulong, SE., MM.
NBM: 903 078

Ketua,
Jurusan IESP

HJ. Naidah, SE., M.Si.
NBM: 710 561



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Gedung Iqra Lt.7 Tel. (0411) 866 972 Makassar

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi atas Nama Assir Arafah, Nim : 105710186712 , diterima dan disahkan oleh Panitia Ujian Skripsi berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar Nomer : M, 8 Safar 1439 H/ 17 Oktober 2018 M, sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar **Sarjana Ekonomi** pada program studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

8 Safar 1439 H
Makassar, 17 Oktober 2018 M

PANITIA UJIAN

1. Pengawas Umum : Dr. H. Abdul Rahman Rahim, SE., MM (.....)
(Rektor Unismuh Makassar)
2. Ketua : Ismail Rasulong, SE., MM (.....)
(Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis)
3. Sekretaris : Dr. Agus Salim HR, SE., MM (.....)
(WD I Fakultas Ekonomi dan Bisnis)
4. Penguji : 1. Ismail Rasulong, SE., MM (.....)
2. Naidah, SE., M.si (.....)
3. Asriati, SE., M.Si (.....)
4. Faidul Adziem, SE., M.Si (.....)

Disahkan oleh,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Makassar



Ismail Rasulong, SE., MM

NBM: 903078

iv



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Gedung Iqra Lt.7 Tel. (0411) 866 972 Makassar

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Assir Arafah

Stambuk : 105710186712

Program Studi : IESP

Dengan Judul : "Kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sinjai".

Dengan ini menyatakan bahwa :

Skripsi yang saya ajukan di depan Tim Penguji adalah ASLI hasil karya sendiri, bukan hasil jiplakan dan tidak dibuat oleh siapa pun.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan saya bersedia menerima sanksi apabila pernyataan ini tidak benar.

Makassar, 17 Oktober 2018

Yang membuat Pernyataan,



Assir Arafah

Diketahui Oleh :

Dekan,
Fakultas Ekonomi & Bisnis
Unismuh Makassar

Ismail Rasulong, SE., MM
NBM: 903 078

Ketua,
Jurusan IESP

HJ. Naidah SE., M.Si
NBM: 710 561

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya yang telah memberikan karunia kemampuan sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi dengan judul “Kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Di Kabupaten Sinjai” Shalawat dan salam kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW, sang revolusioner kehidupan yang menjadi panutan dalam jalan kebenaran.

Sebagai makhluk sosial manusia tidak mampu hidup tanpa bantuan orang lain. Demikian pula penulis yang jauh dari kesempurnaan dan tak akan mampu menyelesaikan skripsi ini tanpa segala bantuan dari berbagai pihak baik dalam bentuk moril maupun materil. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Teristimewa kepada Ayah Mustar dan Ibu Naidah. Kedua orang tua tercinta yang telah melahirkan, merawat, dan membesarkan penulis dengan penuh cinta, kasih sayang, pengorbanan, dan doa. Kerja keras disertai keringat dan air mata untuk membiayai pendidikan penulis hingga mampu sampai pada tahap ini. Dukungan dan motivasi yang tak henti-hentinya mereka berikan, beserta saudara-saudaraku Sadri dan Amri.
2. Dr. H. Abd Rahman Rahim, SE.MM selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.

3. Ismail Rasulong,SE,MM. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar beserta jajaran Staf Administrasi yang telah memberikan kemudahan dalam administrasi pengurusan skripsi ini.
4. Ibunda Hj.Naidah,SE,M,Si. Selaku Ketua Program Studi Ilmu Ekonomi Dan Studi Pembangunan dan juga selaku Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan, arahan, saran serta masukan-masukan dalam penyusunan dan perbaikan skripsi ini.
5. Ayahanda Faidhul Azim,SE,M.Si. Selaku Wakil Dekan II Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar dan juga selaku Pembimbing II yang telah memberikan saran dan masukan dalam perbaikan skripsi ini.
6. Seluruh Dosen dan Staf Administrasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis terkhusus Program Studi Ilmu Ekonomi Dan Studi Pembangunan yang telah membimbing penulis selama mengikuti perkuliahan.
7. Drs.Haeruddin selaku Sekretaris Dinas Pendapatan Daerah yang telah memberikan izin untuk melaksanakan penelitian.
8. Sahabat seperjuangan Umar SE, Abdul rahman SE, Henry SE, Akmal SE, Andi gunawan SE, Andi muhammad yuanda SE, Saharullah SE, Koprall SE, Syarifah nurul huda SE, Om ynag di Skarda yang telah menemani dalam keadaan suka dan duka selama ini.
9. Rekan-rekan seperjuangan Program Studi Ilmu Ekonomi Dan Studi Pembangunan yang tidak dapat disebutkan namanya satu persatu.

10. Seluruh pihak yang tak bisa disebutkan satu per satu yang senantiasa mendukung dan mendoakan penulis untuk menjadi manusia yang lebih baik.

Demikian kesempurnaan skripsi ini, saran dan kritikan yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan. Semoga karya skripsi ini bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi pihak yang membutuhkan Aamiin.

Makassar, Oktober 2018

ASSIR ARAFAH

MOTTO

Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. (QS. Al Baqarah:286)

Setiap kali kamu merasakan keberuntungan, itu adalah do'a ibumu yang terkabulkan.

*Berharap untuk yang terbaik dan
Berencana untuk yang terburuk.
(Ishak Kamal)*

Kupersembahkan karya ini kepada:

- Ayahanda dan Ibundaku tercinta yang senantiasa memberikan do'a dan kasih sayangnya yang tiada tara dan tidak akan pernah terbayarkan dengan apapun.
- Saudara-saudaraku yang selalu memberikan rasa kenyamanan, kebersamaan serta hiburan meskipun dalam kesederhanaan.

ABSTRAK

Assir Arafah, Kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas dan efisiensi PAD kabupaten Sinjai, efektivitas belanja daerah, dan kontribusi PAD terhadap belanja daerah. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yaitu dengan mengumpulkan, mengolah, dan menginterpretasikan data yang diperoleh sehingga memberikan keterangan yang benar dan lengkap untuk pemecahan masalah yang dihadapi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pada periode tahun 2011-2015 PAD kabupaten sinjai mengalami peningkatan pada tiap tahunnya, ini juga diikuti oleh peningkatan belanja daerah yang juga meningkat pada tiap tahunnya, tetapi kontribusi PAD terhadap belanja daerah mengalami naik turun. Kenaikan kontribusi PAD terhadap belanja daerah terjadi pada tahun 2014-2015. Sedangkan kontribusi PAD terhadap investasi daerah (PMDN) juga mengalami peningkatan pada tiap tahunnya, peningkatan yang paling signifikan terjadi pada tahun 2015.

Kata kunci : Pendapatan Asli Daerah, Belanja Daerah, Investasi

ABSTRAK

Assir Arafah, The contribution of lokal revenue (PAD) to the APBD Regional Expenditure Government Budget, the purpose of this study was to determine the effectiveness and efficiency PAD of Sinjai district, the effectiveness of regional spending and the Contribution of PAD to regional spending, the research method used in this research is descriptive qualitative, namely by collecting, managing, and interpreting the data obtained so as to provide correct and complete information for solving the problems at hand. The results of this study indicate that in the period of 2011-2015 the PAD of Sinjai regency has increased every year. But the contribution of PAD to regional spending is up and down. The increase in the contribution of PAD to regional spending occurred in 2014-2015. While the contribution of PAD to regional investment (PMDN) also increased every year, the most significant increase occurred in 2015.

Keywords : Regional income, regional expenditure, Investment

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
ABSTRAK	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	vii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Penelitian Terdahulu.....	6
B. Desentralisasi Fiskal	7
C. Penerimaan Daerah	9
D. Konsep Pendapatan Asli Daerah.....	10
E. Jenis-jenis Pendapatan Asli Daerah.....	18
F. Pengeluaran Daerah	25
G. Kemandirian Fiskal.....	26
H. Kemandirian Daerah Sebagai Wujud Pelaksanaan Otonomi Daerah..	27
I. Kerangka Pikir	29
J. Hipotesis	29
BAB III METODE PENELITIAN	

A. Lokasi Dan Waktu Penelitian	30
B. Jenis dan Sumber Data.....	30
C. Metode Pengumpulan Data.....	31
D. Metode Analisis Data.....	32
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Keadaan Geografi	34
B. Sumber-sumber PAD dan NON PAD	36
C. Laju Perkembangan Nilai PAD	41
D. Kontribusi PAD Terhadap APBD.	43
E. PDRB Atas Dasar Harga Pasar.....	47
F. Pertumbuhan Investasi Daerah (PMDN).....	48
G. Kontribusi PAD Terhadap (PMDN) Kabupaten Sinjai.....	50
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	
A. Kesimpulan	53
B. Saran	54
DAFTAR PUSTAKA.....	55

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam upaya mendukung pelaksanaan pembangunan nasional, pemerintah memberikan kesempatan untuk menyelenggarakan otonomi daerah dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan otonomi daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Dalam rangka pengelolaan rumah tangganya sendiri, pemerintah daerah memerlukan dana yang tidak sedikit. Oleh karena itu, pemerintah daerah harus mengoptimalkan sumber-sumber penerimaan daerah dalam era otonomi daerah dan desentralisasi fiskal. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, sumber penerimaan daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah yang dapat dioptimalkan sebagai sumber penerimaan daerah. (Rahmawati, 2009).

Adapun upaya meningkatkan kemampuan keuangan daerah agar dapat melaksanakan otonomi, Pemerintah pusat melakukan berbagai kebijakan perpajakan daerah, diantaranya dengan menetapkan UU No.34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang kini diperbaharui menjadi UU No. 28 Tahun 2009 yang memberikan kewenangan dalam pengenaan pajak dan retribusi daerah, dengan peraturan ini diharapkan dapat lebih

mendorong Pemerintah Daerah terus berupaya untuk mengoptimalkan PAD, khususnya yang berasal dari pajak daerah dan retribusi daerah. Jadi disini peranan pajak adalah untuk mengoptimalkan PAD (Pendapatan Asli Daerah) dan nantinya akan digunakan untuk pembangunan Daerah (Lovetya dalam Setyawan, 2008).

Dengan UU No. 28 Tahun 2009 mengenai pajak dan retribusi daerah ada dua hal baru, yaitu dimasukkannya Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan Perkotaan (PBB-P2) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebagai pajak daerah yang sebelumnya merupakan pajak pusat yang telah disahkan pada tanggal 15 September 2009 dan mulai berlaku secara efektif pada tanggal 1 Januari 2010. Ini merupakan perubahan besar dalam mendukung desentralisasi seiring dengan pemahaman umum dan pengalaman internasional yang menunjukkan bahwa pajak properti lebih baik diserahkan kepada daerah sebagai sumber pendapatan tingkat kabupaten/kota. Pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan Perkotaan (PBB-P2) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah merupakan langkah maju yang dilakukan oleh Pemerintah dalam penataan sistem perpajakan nasional. Berbagai pihak menilai „kebijakan“ tersebut sudah tepat dilakukan, namun yang tidak kalah pentingnya adalah „bagaimana“ kebijakan tersebut diimplementasikan sehingga daerah benar-benar dapat melakukan pemungutan PBB-P2 dan BPHTB dengan baik sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Paddu, 2012).

Sebagaimana Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu indikator yang menentukan derajat kemandirian suatu daerah. Semakin besar penerimaan PAD suatu daerah maka semakin rendah tingkat ketergantungan pemerintah daerah tersebut terhadap pemerintah pusat dan tingkat kemandirian fiskalnya semakin tinggi pula. Sebaliknya, semakin rendah penerimaan PAD suatu daerah maka semakin tinggi tingkat ketergantungan pemerintah daerah tersebut terhadap pemerintah pusat. Hal ini dikarenakan PAD merupakan sumber penerimaan daerah yang berasal dari dalam daerah itu sendiri. (Rahmawati, 2009).

Tabel 1.1

Data Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Total Belanja, Kabupaten

Sinjai untuk Tahun 2009-2012.

Tahun	PAD	Total Belanja
2007	15.455.723.000	451.620.875.000
2008	16.570.814.000	504.379.486.000
2009	17.674.229.000	452.844.735.000
2010	18.300.422.970	510.509.517.610
2011	14.233.327.000	532.223.832.000

Sumber: BPS Sulawesi Selatan.

Pada Tabel 1.1 dapat kita lihat bahwa penerimaan PAD Kabupaten Sinjai mengalami perubahan dan cenderung mengalami peningkatan selama

periode tahun 2007 hingga tahun 2010 dan total belanja daerah juga cenderung mengalami kenaikan. Pada tabel tersebut juga terlihat bahwa kemampuan Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih belum terlalu tinggi untuk membiayai belanja daerah.

Dengan adanya UU No. 28 Tahun 2009 tentang di daerahnya Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan Pedesaan (PBB-P2) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) pemerintah daerah kabupaten Sinjai dapat memanfaatkan kebijakan ini untuk mengoptimalkan pendapatan daerah yang bisa mendorong tingkat kemandirian fiskal kabupaten Sinjai.

Pendapatan Asli Daerah sebagai salah satu sumber penerimaan daerah mempunyai peranan penting dalam pembangunan. Hal ini dapat dilihat dalam pelaksanaan Otonomi Daerah dimana peranan PAD diharapkan dan diupayakan dapat menjadi penyangga utama dalam membiayai kegiatan pembangunan di daerah. Oleh karena itu pemerintah daerah harus dapat mengupayakan peningkatan penerimaan yang berasal dari daerah sendiri. Dengan demikian akan memperbesar tersedianya keuangan daerah yang dapat digunakan untuk berbagai kegiatan pembangunan yang bersifat mandiri (Putong,2003).

Berdasarkan kondisi tersebut maka dianggap perlu melakukan penelitian tentang kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Sinjai guna untuk menganalisa sejauh mana tingkat pertumbuhan PAD dan sumbangsinya terhadap pembangunan daerah Sinjai.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan berbagai permasalahan yang telah diuraikan dalam latar belakang penelitian, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah PAD dapat memberikan kontribusi pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) ?

C. Tujuan

Tujuan dilaksanakannya Penelitian ini, yaitu untuk mengetahui kontribusi PAD terhadap Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD)

D. Manfaat

Manfaat dari Penelitian ini, yaitu di harapkan dapat memberikan manfaat, baik manfaat secara akademis maupun praktis.

1. Manfaat Akademis

Manfaat Akademis dari penelitian ini, yaitu bahwa hasil dari penelitian ini di harapkan mampu memberikan informasi maupun tambahan ilmu pengetahuan bagi penelitian-penelitian sejenis di masa yang akan datang.

2. Manfaat Praktis

Manfaat Praktis dari penelitian ini di harapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran kepada berbagai pihak yang berkepentingan dalam Pendapatan Asli daerah pada umumnya dan daerah Sinjai pada khususnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Terdahulu

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 menyatakan bahwa pemberian otonomi pada daerah kabupaten dan daerah kota didasarkan pada asas desentralisasi dalam wujud otonomi yang luas, nyata, dan bertanggung jawab. Kewenangan otonomi luas adalah keleluasaan daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan yang mencakup kewenangan semua bidang, kecuali kewenangan di bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama. Disamping itu, keleluasaan otonomi mencakup pula kewenangan yang utuh dan bulat dalam penyelenggaraan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian, dan evaluasi.

Otonomi nyata adalah keleluasaan daerah untuk menyelenggarakan

kewenangan pemerintahan di bidang tertentu yang secara nyata ada dan diperlukan serta tumbuh, hidup, dan berkembang di daerah, sedangkan yang dimaksud dengan otonomi yang bertanggung jawab adalah berupa perwujudan pertanggungjawaban sebagai konsekuensi pemberian hak dan kewenangan kepada daerah dalam wujud tugas dan kewajiban yang harus dipikul oleh daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi, berupa peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik, pengembangan kehidupan demokrasi, keadilan dan pemerataan, serta pemeliharaan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah serta antar-daerah dalam rangka menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

B. Desentralisasi Fiskal

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Menurut Sinaga dan Siregar (2005), dalam kaitannya dengan desentralisasi fiskal, desentralisasi berarti pendelegasian kewenangan dan tanggung jawab fiskal dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah.

Terdapat tiga variasi desentralisasi fiskal dalam kaitannya dengan derajat kemandirian pengambilan keputusan yang dilakukan oleh daerah. *Pertama*, desentralisasi berarti pelepasan tanggung jawab yang berada dalam lingkup pemerintah pusat ke instansi vertikal di daerah atau ke pemerintah daerah yang dinamakan dekonsentrasi. *Kedua*, delegasi

berhubungan dengan suatu situasi, yaitu daerah bertindak sebagai perwakilan pemerintah untuk melaksanakan fungsi-fungsi tertentu atas nama pemerintah yang dinamakan delegasi. *Ketiga*, devolusi (pelimpahan) berhubungan dengan suatu situasi yang bukan saja implementasi tetapi juga kewenangan untuk memutuskan apa yang perlu dikerjakan, berada di daerah (Bird dan Vaillancourt, 2000 dalam Sinaga dan Siregar, 2005). Prinsip pemberian otonomi kepada pemerintah daerah pada dasarnya adalah untuk membantu pemerintah pusat dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Adapun yang menjadi tujuan dari desentralisasi menurut (Rahdina, 2008) adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan keadilan antara kemampuan dan hak daerah.
2. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan pengurangan subsidi pemerintah pusat.
3. Mendorong pembangunan daerah sesuai dengan aspirasi masing-masing daerah.

Menurut Sinaga dan Siregar (2005), desentralisasi fiskal memiliki fungsi-fungsi sebagai berikut: (1) mengurangi peran dan tanggung jawab diantara pemerintah pada semua tingkat, (2) memperhitungkan bantuan atau transfer antar pemerintahan, (3) memperkuat sistem penerimaan daerah/lokal atau merumuskan penyediaan jasa-jasa lokal, (4) memprivatisasi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), (5) menyediakan suatu jaringan pengaman bagi fungsi redistribusi. Oleh karena itu, keberhasilan dari desentralisasi fiskal juga dapat dilihat dari sejauh mana fungsi-fungsi tersebut di atas telah dilaksanakan.

C. Penerimaan Daerah

Penerimaan daerah adalah uang yang masuk ke kas daerah. Dalam pelaksanaan desentralisasi, penerimaan daerah terdiri atas pendapatan dan pembiayaan. Pendapatan daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambahan nilai kekayaan bersih dalam periode tahun bersangkutan, sedangkan pembiayaan daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menyebutkan bahwa sumber-sumber pendapatan daerah adalah:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD), yaitu pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang meliputi:
 - a. Pajak daerah;
 - b. Retribusi daerah;
 - c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
 - d. Lain-lain PAD yang sah.
2. Dana perimbangan, yaitu dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah. Dana perimbangan terdiri dari dua jenis, yaitu dana bagi hasil dan dana transfer. Dana bagi hasil terdiri dari

bagi hasil penerimaan pajak (*tax sharing*) dan bagi hasil penerimaan Sumber Daya Alam (SDA). Adapun yang termasuk dalam pembagian hasil perpajakan adalah Pajak Penghasilan (PPh) perorangan, PBB, dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Sedangkan pembagian hasil penerimaan dari SDA berasal dari kehutanan, pertambangan umum, perikanan, pertambangan minyak bumi, pertambangan gas bumi, dan pertambangan panas bumi. Dana transfer sebagai komponen dana perimbangan lainnya, terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK).

3. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Sedangkan sumber penerimaan daerah yang lainnya, yaitu pembiayaan bersumber dari:

- a. Sisa lebih perhitungan anggaran daerah;
- b. Penerimaan pinjaman daerah;
- c. Dana cadangan daerah; dan
- d. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan.

D. Konsep Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Untuk memahami konsep PAD (Pendapatan Asli Daerah) kita harus mengetahui terlebih dahulu konsep mengenai pendapatan. pendapatan kotor (penerimaan) adalah jumlah semua produksi yang dihasilkan dikalikan dengan harga yang berlaku dipasar. Olehnya itu untuk lebih memahami mengenai kosep pendapatan dianggap perlu nuntuk menganalisis faktor-faktor yang berpengaruh terhadap pendapatan (Soekartawi, 2003):

- 1) penerimaan yaitu jumlah produksi yang dihasilkan dalam suatu kegiatan usaha dikalikan dengan harga jual yang berlaku di pasar.
- 2) Biaya produksi, yaitu semua pengeluaran yang dinyatakan dengan uang yang diperlukan untuk menghasilkan produksi.
- 3) Pendapatan bersih adalah total jumlah penerimaan dikurangi dengan total jumlah pengeluaran untuk produksi

Lebih lanjut penelitian mengenai pendapatan dapat dilakukan dengan pendekatan analisis biaya yaitu dengan memperhatikan biaya tetap dan biaya variabel. Biaya tetap adalah biaya yang digunakan tidak selamanya kontinu, sedangkan biaya variabel adalah biaya yang digunakan secara kontinyu dengan jumlah produksi.

Menurut Mubyarto (2004) analisis biaya biaya dan pendapatan sangatlah penting untuk mengetahui semua pengeluaran yang dinyatakan dengan uang yang diperlukan sesuatu produk dalam suatu periode produksi. Dari analisis ini kemudian kita dapat menghitung besarnya jumlah keuntungan yang diperoleh setiap kali usaha produksi. Gambaran ini memberi pemahaman tentang kisaran keuntungan jika proses produksi dilaksanakan. Jadi dapat dikatakan bahwa Keuntungan/pendapatan bersih adalah selisih dari jumlah penerimaan dan total biaya yang dikeluarkan dimana Biaya adalah semua keluaran / korbanan yang digunakan dalam berproduksi.

Tentunya untuk menghitung pendapatan nasional dan pendapatan asli daerah berbeda dengan menghitung pendapatan biasa sebab variable yang

menjadi tolak ukur sangat beragam. Secara umum pendapatan nasional dapat diartikan sebagai produk nasional kotor (GNP) atau produk nasional bersih (NNP). GNP (Gross Nasional Bruto) adalah nilai barang dan jasa yang diproduksi oleh suatu Negara dalam suatu periode tertentu yang diukur dengan satuan uang berdasarkan perhitungan semua nilai barang dan jasa yang dihasilkan seluruh warga Negara Indonesia yang ada didalam negeri maupun diluar negeri. Pendapatan nasional ini dapat dihitung dengan melakukan 3 metode pendekatan yaitu : pertama dengan metode produksi yaitu dengan cara menjumlahkan nilai produksi yang dihasilkan oleh sector-sektor produktif. Yang kedua adalah dengan menggunakan metode pendapatan yaitu dengan menjumlahkan semua pendapatan dari factor-faktor produksi dalam perekonomian (manusia/Tenaga Kerja, modal, tanah dan skill). Yang terakhir adalah metode pengeluaran/penggunaan yaitu dengan cara menghitung semua pengeluaran ,baik yang dilakukan oleh rumah tangga konsumen,rumah tangga swasta/produsen, rumah tangga pemerintah dan eksport netto (Putong, 2003).

Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah disebutkan bahwa sumber pendapatan daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak. Pendapatan Asli Daerah sendiri terdiri dari : Pajak Daerah, Retribusi Daerah , Hasil pengolahan kekayaan daerah yang dipisahkan dan Lain-lain PAD yang sah.

Jadi jelas bahwa PAD merupakan keseluruhan sumber pemasukan daerah yang sah untuk pembiayaan pembangunan daerah. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pendapatan asli daerah adalah dapat berasal dari pengolahan sumber daya yang ada di daerah kabupaten yang terjaring melalui perangkat peraturan daerah ditambah dengan penerimaan dari provinsi dan pemerintah pusat.

Kemampuan keuangan daerah di dalam membiayai kegiatan pembangunan di daerah merupakan pencerminan dari pelaksanaan otonomi di daerah. Untuk melihat kemampuan Pemerintah Kabupaten dalam menghimpun penerimaan daerah baik penerimaan yang berasal dari sumbangan dan bantuan pemerintah pusat maupun penerimaan yang berasal dari daerah sendiri dapat dilihat dari APBD yang biayanya bersumber dari PAD dengan tingkat kesesuaian yang mencukupi pengeluaran pemerintah daerah (<http://reviewtesis.blogspot.com>, 2012).

Upaya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah tentunya tidak terlepas dari peranan masing-masing komponen Pendapatan Asli Daerah. Komponen yang ada seperti penerimaan pajak daerah, retribusi daerah, bagian laba perusahaan milik daerah, penerimaan dinas-dinas serta penerimaan daerah lainnya. Ini merupakan beberapa komponen yang menjadi sumber penerimaan daerah dimana tentunya akan terus digali baik yang sudah ada maupun sumber penerimaan baru yang potensial.

Kewenangan yang begitu luas tentunya akan membawa konsekuensi-konsekuensi tertentu bagi daerah untuk menjalankan kewenangannya itu.

Salah satu konsekuensinya adalah bahwa daerah harus mampu membiayai semua kegiatan pemerintahan dan pembangunan yang menjadi kewenangannya. Sejalan dengan hal tersebut, Koswara (2000 : 5) menyatakan bahwa daerah otonom harus memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangannya sendiri, mengelola dan menggunakan keuangan sendiri yang cukup memadai untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerahnya. Ketergantungan kepada bantuan pusat harus seminimal mungkin, sehingga PAD harus menjadi bagian sumber keuangan terbesar, yang didukung kebijakan perimbangan keuangan pusat dan daerah sebagai prasyarat mendasar dalam sistem pemerintahan negara. (<http://reviewtesis.blogspot.com>, 2012).

Isyarat bahwa PAD harus menjadi bagian sumber keuangan terbesar bagi pelaksanaan otonomi daerah menunjukkan bahwa PAD merupakan tolok ukur terpenting bagi kemampuan daerah dalam menyelenggarakan dan mewujudkan otonomi daerah. Di samping itu PAD juga mencerminkan kemandirian suatu daerah. Sebagaimana Santoso (1995 : 20) mengemukakan bahwa PAD merupakan sumber penerimaan yang murni dari daerah, yang merupakan modal utama bagi daerah sebagai biaya penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

Meskipun PAD tidak seluruhnya dapat membiayai total pengeluaran daerah, namun proporsi PAD terhadap total penerimaan daerah tetap merupakan indikasi derajat kemandirian keuangan suatu pemerintah daerah. Untuk lebih mengetahui tingkat pertumbuhan PAD suatu daerah terlebih

dahulu kita harus memahami konsep-konsep penting yang berkaitan dengan hal-hal penting yang menentukan PAD suatu daerah diantaranya.

- a). Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator pertumbuhan ekonomi suatu negara/ wilayah/ daerah. Pertumbuhan tersebut dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya infrastruktur ekonomi.
- b). PDRB adalah jumlah nilai tambah bruto yang dihasilkan seluruh unit usaha dalam wilayah tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi.

PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung dengan menggunakan harga pada setiap tahun, sedangkan PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada satu tahun tertentu sebagai tahun dasar penghitungannya.

PDRB atas dasar harga berlaku dapat digunakan untuk melihat pergeseran struktur ekonomi, sedangkan harga konstan dapat digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun.

Dengan demikian, PDRB merupakan indikator untuk mengukur sampai sejauhmana keberhasilan pemerintah dalam memanfaatkan sumber daya yang ada, dan dapat digunakan sebagai perencanaan dan pengambilan keputusan.

Ada beberapa konsep definisi yang perlu diketahui :

1. Produk Domestik Regional Bruto atas Dasar Harga Pasar

PDRB atas dasar harga pasar merupakan penjumlahan nilai tambah bruto dari seluruh sektor perekonomian didalam suatu wilayah dalam periode tertentu, biasanya satu tahun, yang dimaksud dengan nilai tambah adalah selisih nilai produksi dengan biaya antara.

2. Produk Domestik Regional Neto atas Dasar harga Pasar

PDRN atas dasar harga pasar merupakan PDRB yang dikurangi dengan penyusutan. Penyusutan dikeluarkan dari PDRB oleh karena susutnya barang modal selama berproduksi untuk melanjutkan proses pembangunan di suatu daerah yang masih berkembang.

3. Produk Domestik Regional Neto atas Dasar Biaya Faktor

PDRN atas dasar biaya faktor adalah PDRN atas dasar harga pasar dikurangi pajak tak langsung ditambah dengan subsidi dari pemerintah.

4. Pendapatan Regional

PDRN atas dasar biaya faktor merupakan jumlah balas jasa faktor-faktor produksi dalam proses produksi, dan tidak seluruhnya menjadi milik suatu daerah/wilayah karena termasuk pula didalamnya pendapatan penduduk wilayah lain. Demikian sebaliknya, PDRN tersebut harus pula ditambah dengan pendapatan yang diperoleh daerah lain. Bila pendapatan penduduk yang masuk dan keluar dapat dicatat dengan pendapatan neto antar wilayah/daerah didapatkan pendapatan regional (Produk Regional Bruto). Karena sulitnya memperoleh data pendapatan masuk dan keluar suatu wilayah maka PDRN atas dasar

biaya faktor diasumsikan sama dengan pendapatan regional atau pendapatan neto

5. Pendapatan Regional Perkapita

Pendapatan perkapita merupakan pendapatan yang diterima oleh masing-masing perkepala penduduk. Pendapatan perkapita tersebut dihasilkan dengan membagi pendapatan regional/produk regional neto dengan jumlah penduduk pertengahan tahun.

6. Produk Domestik dan Produk Regional

Ada perbedaan pengertian dalam literatur ekonomi mengenai produk domestik dengan produk regional. Kenyataan menunjukkan bahwa sebagian kegiatan produksi yang dilakukan disuatu daerah, beberapa faktor produksinya berasal dari wilayah/ daerah lain seperti tenaga kerja, mesin dan modal. Sehingga nilai produksi di wilayah atau domestik tidak sama dengan pendapatan yang diterima oleh penduduk tersebut, yang pada akhirnya menimbulkan perbedaan antara produk domestik dan produk regional. Produk regional merupakan produk domestik yang ditambahkan pendapatan yang mengalir kedalam wilayah tersebut, kemudian dikurangi pendapatan yang mengalir keluar wilayah. Sehingga dapat dikatakan produk regional pada dasarnya merupakan produk yang betul-betul dihasilkan oleh faktor-faktor produksi yang dimiliki penduduk sekitar yang sudah diwariskan secara turun-temurun oleh keluarga yang terdahulu dalam wilayah yang bersangkutan.

7. **Pendapatan Regional Atas Dasar Harga Berlaku dan Harga Konstan** Pendapatan regional atas dasar harga konstan didapat melalui operasi pengurangan Pendapatan regional atas dasar harga berlaku dengan perkembangan inflasi. Pendapatan Asli Daerah meskipun diharapkan dapat menjadi modal utama bagi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, pada saat ini kondisinya masih kurang memadai.

Dalam arti bahwa proporsi yang dapat disumbangkan PAD terhadap Total Penerimaan Daerah (TPD) masih relatif rendah. Sebagaimana yang dialami Pemerintah Kota Yogyakarta, selama kurun waktu tahun anggaran 1991/1992 – 2000 proporsi PAD terhadap TPD rata-rata sebesar 32,96 %.

E. Jenis-Jenis Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Untuk dapat memungut pajak biasanya pemerintah menggunakan sistem pemungutan melalui *official assessment sistem dan self assessment system* . Sistem pemungutan ini dilakukan melalui dua cara yaitu surat ketetapan pajak dan retribusi. Upaya penanganan yang telah dilakukan dan akan terus ditingkatkan antara lain adalah melalui (Herinyato, 2003):

1. Upaya menciptakan suatu sistem informasi pendapatan daerah yang dapat secara akurat memberikan gambaran menyeluruh mengenai data potensi Pajak Daerah, Retribusi Daerah maupun pungutan-pungutan lainnya sehingga dapat diketahui seberapa besar sebenarnya potensi pendapatan di suatu daerah yang dapat digali dan dikembangkan serta dikelola secara profesional.

2. Secara intensif, kontinyu dan terpadu memberikan penyuluhan atau sosialisasi berbagai perangkat peraturan di bidang pungutan daerah kepada masyarakat serta secara persuasif membantu masyarakat dalam memenuhi kewajibannya.
3. Kualitas dan kuantitas Koordinasi antar instansi akan terus ditingkatkan, antara lain melalui berbagai rapat koordinasi dan evaluasi pendapatan daerah agar terjalin dan tercipta suatu kesamaan visi bagi semua instansi terkait dalam melihat betapa pentingnya upaya penggalian dan pengembangan pendapatan daerah di era otonomi ini.
4. Sarana dan prasarana utama yang menyangkut operasionalisasi pungutan seperti alat transportasi, komputerisasi serta sarana pendukung lainnya akan lebih mendapatkan perhatian, sehingga dapat mengatasi kendala luasnya jangkauan objek pajak serta mempercepat pelayanan kepada masyarakat.
5. Membangkitkan kembali usaha strategis berbasis ekonomi kerakyatan yang memiliki skala ekonomi luas agar dapat berkembang dan memberdayakan masyarakat secara

Pada masa sekarang ini dengan perubahan paradigma pemerintahan yang ditandai dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999, pemerintah pusat mencoba meletakkan kembali arti penting otonomi daerah pada posisi yang sebenarnya, yaitu bahwa otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut

prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundangan. Kewenangan daerah tersebut mencakup seluruh bidang pemerintahan, kecuali kewenangan dalam bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama, serta kewenangan bidang lain.

Apabila diamati lebih jauh, maka dapat dilihat di mana sebenarnya letak kecilnya nilai PAD suatu daerah. Untuk mengetahui hal ini perlu diketahui terlebih dahulu unsur-unsur yang termasuk dalam kelompok PAD. Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 dinyatakan bahwa PAD terdiri dari (<http://wikipedia.com/peranan pajak>, 2012):

1. hasil pajak daerah; yaitu seluruh Objek pajak yang dapat digunakan untuk sumber pemasukan daerah
2. hasil retribusi daerah; yaitu hasil-hasil retribusi yang terjaring melalui peraturan daerah
3. hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkannya;
4. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Menurut Widayat (1994 : 31) faktor-faktor yang mempengaruhi rendahnya penerimaan PAD antara lain adalah :

1. banyak sumber pendapatan di kabupaten/kota yang besar, tetapi digali oleh instansi yang lebih tinggi, misalnya pajak kendaraan bermotor (PKB), dan pajak bumi dan bangunan (PBB);

2. badan Usaha Milik Daerah (BUMD) belum banyak memberikan keuntungan kepada Pemerintah Daerah;
3. kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak, retribusi, dan pungutan lainnya;
4. adanya kebocoran-kebocoran;
5. biaya pungut yang masih tinggi
6. banyak Peraturan Daerah yang perlu disesuaikan dan disempurnakan;
7. kemampuan masyarakat untuk membayar pajak yang masih rendah.

Menurut Jaya (1996 : 5) beberapa hal yang dianggap menjadi penyebab utama rendahnya PAD sehingga menyebabkan tingginya ketergantungan daerah terhadap pusat, adalah sebagai berikut :

1. kurang berperannya Perusahaan Daerah sebagai sumber pendapatan daerah;
2. tingginya derajat sentralisasi dalam bidang perpajakan, karena semua jenis pajak utama yang paling produktif baik pajak langsung maupun tidak langsung ditarik oleh pusat;
3. kendati pajak daerah cukup beragam, ternyata hanya sedikit yang bisa diandalkan sebagai sumber penerimaan;
4. alasan politis di mana banyak orang khawatir apabila daerah mempunyai sumber keuangan yang tinggi akan mendorong terjadinya disintegrasi dan separatisme; dan kelemahan dalam pemberian subsidi Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah yang hanya memberikan kewenangan

yang lebih kecil kepada Pemerintah Daerah merencanakan pembangunan di daerahnya.

Secara umum dari kedua pendapat di atas diketahui bahwa masalah rendahnya PAD disebabkan lebih banyak pada unsur perpajakan. Lebih jauh mengenai perpajakan dan permasalahannya perlu dikemukakan pendapat Reksohadiprodjo (1996 : 74-78), yaitu bahwa beberapa masalah yang sering dihadapi sistem pajak di daerah secara keseluruhan, di antaranya adalah adanya kemampuan menghimpun dana yang berbeda antara daerah yang satu dengan daerah lainnya, yang disebabkan karena perbedaan dalam resources endowment, tingkat pembangunan, dan derajat urbanisasi. Masalah lainnya adalah terlalu banyaknya jenis pajak daerah dan sering tumpang tindih satu dengan yang lainnya. Tidak ada perbedaan yang jelas antara pajak dengan pungutan lainnya, dan masalah biaya administrasi pajak yang tinggi ([www.jurnalskipi .com](http://www.jurnalskipi.com), 2011).

Pada akhirnya keberhasilan otonomi daerah tidak hanya ditentukan oleh besarnya PAD atau keuangan yang dimiliki oleh daerah tetapi ada beberapa faktor lain yang dapat mempengaruhi keberhasilannya. Sebagaimana pendapat yang dikemukakan oleh Kaho (1997 : 34-36) bahwa keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu ([http:// /ekonomi mikro\ekonomi indonesia\TempointeraktifCom](http://ekonomi.mikro\ekonomi.indonesia\TempointeraktifCom), 2011) :

1. Faktor manusia; yaitu kemampuan dan keahlian sumber daya manusia yang ada di daerah

2. Faktor keuangan; yaitu tinggi rendahnya PAD (Pendapatan Asli Daerah) sebagai sumber keuangan daerah.
3. Faktor peralatan; yaitu kelengkapan prasarana
4. Faktor organisasi dan manajemen yaitu bagaimana perangkat pemerintah dibangun.

Pelaksanaan kebijakan Otonomi Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 menimbulkan kecemasan dari kalangan dunia usaha terhadap kemungkinan pengenaan berbagai pajak, retribusi atau pungutan lainnya oleh Pemerintah Daerah terhadap dunia usaha untuk memacu peningkatan PAD. Upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah untuk meningkatkan PAD tentu saja dilakukan sepanjang koridor regulasi yang ada, karena penetapan suatu kebijakan dalam bentuk Peraturan Daerah bukan lagi monopoli Pemerintah Daerah tetapi juga diawasi oleh legislatif dan masyarakat. Baik Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah maupun penggantinya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, mengatur tentang Pendapatan asli Daerah (PAD) tersebut. Dalam UU 5/1974 dinyatakan bahwa PAD terdiri dari; 1) hasil pajak Daerah, 2) hasil retribusi Daerah, 3) hasil Perusahaan Daerah, 4) lain-lain usaha Daerah yang sah.

Kemudian dengan lahirnya kebijakan Otonomi Daerah dengan desentralisasi otoritas dan desentralisasi fiskal yang diatur dengan UU 22/1999 tentang Pemerintahan Daerah dan UU 25/1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, dijelaskan

bahwa sumber pendapatan Daerah terdiri dari : pertama yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), yaitu: Hasil pajak Daerah, Hasil retribusi Daerah, Hasil perusahaan milik Daerah, dan hasil penge-lolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan dan Lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah. Yang kedua adalah Dana Perimbangan, yaitu: Bagian Daerah dari penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, dan penerimaan dari sumber daya alam. Yang ketiga Dana Alokasi Umum (DAU). Dana Alokasi Khusus (DAK). Yang terakhir adalah Pinjaman Daerah dan Lain-lain pendapatan Daerah yang sah.

Selain jenis Pajak Daerah di atas dapat ditetapkan Pajak Daerah lainnya dengan Peraturan Daerah dengan memenuhi kriteria tertentu, antara lain; bersifat pajak dan bukan retribusi, objek pajak berada dalam wilayah Kabupaten/Kota serta dasar pengenaan tidak bertentangan dengan kepentingan umum, bukan merupakan objek Pajak Propinsi atau Pajak Pusat, tidak memberikan dampak ekonomi yang negatif, memperhatikan aspek keadilan, dan menjaga kelestarian lingkungan.

Sedangkan Retribusi daerah dibagi atas 3 (tiga) golongan yaitu; Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, dan Retribusi Perizinan Tertentu. Jenis-jenis ketiga golongan retribusi tersebut ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah berdasarkan kriteria tertentu. Selain jenis Retribusi Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah tersebut juga dapat ditetapkan Retribusi daerah lainnya dengan Peraturan Daerah sesuai dengan kewenangan Otonomi Daerah dan memenuhi kriteria yang telah ditetapkan.

F. Pengeluaran Daerah

Pengeluaran daerah terdiri dari belanja tak langsung, belanja langsung, dan pengeluaran pembiayaan daerah. Belanja tak langsung meliputi bagian belanja yang dianggarkan tidak terkait langsung dengan pelaksanaan program. Belanja tak langsung terdiri dari : Belanja pegawai berupa gaji dan tunjangan yang telah ditetapkan undang-undang, Belanja bunga, Belanja hibah, Belanja bantuan sosial, Belanja bagi hasil kepada propinsi/kabupaten/kota dan pemerintah desa, Belanja bantuan keuangan, serta Belanja tak tersangka. Sedangkan belanja langsung meliputi belanja yang dianggarkan terkait langsung dengan pelaksanaan program. Belanja langsung terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta belanja modal untuk melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah dan telah dianggarkan oleh pemerintah daerah.

Pengeluaran pemerintah mencerminkan kebijakan pemerintah. Apabila pemerintah telah menetapkan suatu kebijakan untuk membeli barang dan jasa, pengeluaran pemerintah mencerminkan biaya yang harus dikeluarkan oleh pemerintah untuk melaksanakan kebijakan tersebut. (Mangkoesobroto, 1994 dalam Maharani S, 2011)

Pengeluaran pemerintah mempunyai dasar teori yang dapat dilihat dari identitas keseimbangan pendapatan nasional yaitu $Y = C + I + G + (X - M)$ yang merupakan sumber legitimasi pandangan kaum Keynesian akan relevansi campur tangan pemerintah dalam perekonomian. Dari persamaan diatas dapat ditelaah bahwa kenaikan atau penurunan pengeluaran

pemerintah akan menaikkan atau menurunkan pendapatan nasional. Banyak pertimbangan yang mendasari pengambilan keputusan pemerintah dalam mengatur pengeluarannya. Pemerintah tidak cukup hanya meraih tujuan akhir dari setiap kebijaksanaan pengeluarannya. Tetapi juga harus memperhitungkan sasaran antara yang akan menikmati kebijaksanaan tersebut. Memperbesar pengeluaran dengan tujuan semata-mata untuk meningkatkan pendapatan nasional atau memperluas kesempatan kerja adalah tidak memadai. Melainkan harus diperhitungkan siapa yang akan terpekerjakan atau meningkat pendapatannya. Pemerintah pun perlu menghindari agar peningkatan perannya dalam perekonomian tidak melemahkan kegiatan pihak swasta. (Dumairy, 1997 dalam Maharani S, 2011).

G. Kemandirian Fiskal

Kemandirian fiskal adalah independensi pemerintah daerah dalam melakukan perencanaan anggaran daerah, pungutan dan optimalisasi pungutan sumber-sumber pendapatan daerah dan pengelolaan dana daerah dalam melakukan kegiatan pemerintahan dan pembangunan daerah (Lestim 2006 dalam Djamal 2011).

Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah, pemerintah daerah diharapkan memiliki kemandirian yang lebih besar dalam keuangan daerah. Oleh karena itu, peranan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Bagi Hasil (DBH), dan Lain-lain Pendapatan yang Sah (LP) sangat menentukan kemandirian fiskal daerah. Pengukuran kemandirian fiskal daerah yang

banyak dilakukan pada saat ini antara lain dengan melihat rasio antara masing-masing komponen pendapatan daerah dengan Total Penerimaan Daerah (TPD). Prinsipnya, semakin besar sumbangan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Bagi Hasil (DBH), dan Lain-lain Pendapatan yang Sah (LP), maka semakin besar pula pendapatan daerah tersebut, sehingga akan menunjukkan semakin kecil ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah Pusat.

H. Kemandirian Sebagai Wujud dari Pelaksanaan Otonomi Daerah

Menurut Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, maka aspirasi daerah untuk melaksanakan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab dapat terwujud dengan baik. Dalam konteks ini, daerah akan diberi keleluasaan untuk menyelenggarakan kewenangan yang secara nyata ada dan diperlukan serta tumbuh, hidup dan berkembang di daerah, termasuk segala konsekuensi kewajiban-kewajiban yang ada didalamnya, dengan tujuan akhir peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat, pengembangan kehidupan demokratis, keadilan, pemerataan, dan pemeliharaan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah serta antar daerah. Dengan kata lain, pelaksanaan otonomi daerah akan memberikan kewenangan yang lebih besar kepada pemerintah daerah untuk mengatur daerahnya. Secara perlahan namun pasti, peran pemerintah pusat akan semakin kecil, sedangkan peran pemerintah daerah akan semakin besar

besar dalam pembangunan daerahnya.

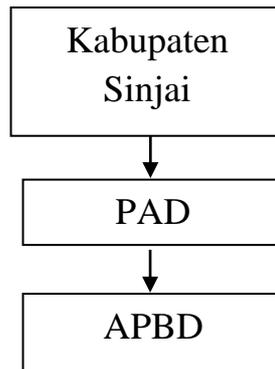
Menurut Koswara dalam Suharno (2003:1), terwujudnya pelaksanaan otonomi daerah yang secara efektif dan efisien akan sangat tergantung pada tersedianya sumber daya pendukung. Sumber daya pendukung ini merupakan faktor eksternal yang mempengaruhi pelaksanaan otonomi daerah, baik yang bersumber dari kebijaksanaan pemerintah pusat (berupa kebijaksanaan pajak, retribusi daerah, sumbangan dan bantuan pusat) maupun yang berasal dari potensi daerah (berwujud peran serta masyarakat dan potensi ekonomi daerah).

Untuk mengantisipasi implikasi tuntutan kemandirian dalam pembiayaan pembangunan daerahnya, dan juga untuk mewujudkan pelaksanaan otonomi daerah yang efektif dan efisien, maka pemerintah daerah harus mampu melakukan optimalisasi sumber-sumber penerimaan daerahnya sebagaimana diatur dalam UU No. 25 Tahun 1999. Dalam Undang-undang tersebut dinyatakan bahwa sumber penerimaan daerah berasal dari 4 (empat) sumber, yaitu :

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD), antara lain berasal dari pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan lainnya yang dipisahkan, serta lain-lain PAD.
2. Dana Perimbangan, yang terdiri dari 3 (tiga) elemen sumber pembiayaan yaitu Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Bagi Hasil dari Penerimaan PBB, BPHTB, PPh Perseorangan, dan penerimaan Sumber Daya Alam (SDA).

3. Dana Peminjaman Daerah, yaitu dana yang dapat diperoleh dari hasil pinjaman baik dalam maupun luar negeri untuk membiayai sebagian anggaran pembangunan daerah.

I. Kerangka Pikir



J. Hipotesis

Berdasarkan pemikiran yang terkandung dalam Rumusan masalah dan tujuan yang hendak dicapai maka hipotesis dirumuskan sebagai berikut :

“diduga bahwa kontribusi pendapatan asli daerah (PAD) terhadap anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) cukup besar.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian

1. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di kantor Dinas Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Sinjai.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian direncanakan selama 2 (dua) bulan yaitu bulan April sampai Mei 2016.

B. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Jenis data yang digunakan pada Penelitian ini adalah data kualitatif dan kuantitatif.

- a. Data kualitatif untuk mengungkap informasi baik lisan maupun tulisan mengenai tingkat pendapatan asli daerah Sinjai
- b. Data kuantitatif untuk mengukur besarnya pendapatan asli produksi yang diperoleh, keuntungan bersih dan besarnya biaya yang dikeluarkan.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Data primer, merupakan data yang diperoleh secara langsung dari pegawai Kantor Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan di Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sinjai

- b. Data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui penelusuran pustaka. Data ini merupakan pelengkap data primer yang diperoleh dari berbagai sumber pustaka dan buku-buku referensi.

C. Metode Pengumpulan Data

Metode yang digunakan pada penelitian ini yaitu melalui Observasi, teknik Wawancara, praktikan langsung melakukan tanya jawab dengan pegawai di Kantor Dinas Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sinjai.

1. Observasi

Merupakan salah satu tehnik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif, yaitu dengan cara mengadakan pengamatan secara langsung di lokasi penelitian. Pengamatan secara langsung ini dimaksudkan agar peneliti dapat melihat dan memahami secara langsung fenomena sebenarnya yang terjadi di lokasi penelitian.

Adapun observasi dalam penelitian ini dilakukan untuk melihat dan memahami secara langsung mengenai fenomena yang terkait dengan permasalahan dalam penelitian ini, yaitu mengenai Peranan Pendapatan Asli Daerah terhadap Anggaran Pendapatan Belanja Daerah di Kabupaten Sinjai, Kontribusi Pendapatan Asli Daerah Terhadap Anggaran Pendapatan Belanja Daerah. Data-data yang diperoleh selama pengamatan langsung di lokasi penelitian didokumentasikan dengan cara direkam dengan video, mencatatnya pada catatan lapangan dan difoto dengan menggunakan kamera.

2. Wawancara

Wawancara merupakan sebuah teknik pengumpulan data dengan cara melakukan percakapan dengan maksud tertentu (Moleong, 2012). Wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu dan dengan wawancara, peneliti akan mengetahui hal-hal yang lebih mendalam tentang partisipan dalam menginterpretasikan situasi dan fenomena yang terjadi yang tidak bisa ditemukan melalui observasi (Sugiyono, 2008). Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif, yaitu dengan cara mengajukan pertanyaan kepada informan dengan tujuan untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan topik penelitian.

1. Dokumentasi

Dalam proses wawancara, informasi yang diberikan oleh informan atau narasumber didokumentasikan dengan alat perekam suara (*tape recorder*) atau dicatat pada buku catatan.

D. Metode Analisis Data

Data yang diperoleh dengan teknik observasi, wawancara dan studi dokumen dalam penelitian ini selanjutnya dianalisa dengan teknik analisis deskriptif, kualitatif. Menurut Moleong (2001), analisis data adalah proses mengorganisir dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema untuk dirumuskan menjadi simpulan.

Adapun proses analisis data dengan teknik analisis deskriptif kuantitatif dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Analisis Kontribusi

Analisi Kontribusi yaitu suatu alat analisis yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi dapat disumbangkan dari penerimaan pajak daerah, retribusi, laba Badan Usaha Milik Daerah dan pendapatan lain yang sah terhadap Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Sinjai. Penggunaan analisis dapat diketahui peran pajak daerah, retribusi daerah, laba BUMD dan pendapatan lain yang sah dalam kontribusi terhadap pendapatan asli Daerah Kabupaten Sinjai.

$$P_n = \frac{\text{PAD}}{\text{APBD}} \times 100\%$$

Keterangan : p_n = Kontribusi penerimaan komponen PAD terhadap APBD (Rupiah), Q_Y = Jumlah komponen penerimaan PAD (Rupiah), Q_X = jumlah penerimaan APBD (Rupiah), n = Tahun (periode) tertentu.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Keadaan Geografis

1. Letak Geografis dan Luas Wilayah

Secara geografis, Kabupaten Sinjai terletak di bagian pantai timur Propinsi Sulawesi Selatan yang berjarak sekitar 223 km dari kota Makassar. Tepatnya berada pada posisi : 5o 19' 50" - 5o 36' 47" Lintang Selatan (LS) dan antara 119o 48' 30" - 120o 10' 00" Bujur Timur (BT).

Luas wilayahnya berdasarkan data yang ada, seluas 819,96 Km² (81.996 Ha). Secara administratif, Kabupaten Sinjai mencakup 9 (Sembilan) kecamatan yang terdiri dari 80 desa dan kelurahan.

Posisi wilayahnya berbatasan dengan Kabupaten Bone (bagian Utara), Teluk. Bone (bagian Timur), Kabupaten Bulukumba (bagian Selatan) dan Kabupaten Gowa (di bagian Barat). Secara administratif, Kabupaten Sinjai mencakup 9 Kecamatan, 13 Kelurahan dan 67 Desa.

- Kecamatan Sinjai Utara, 5 Kelurahan
- Kecamatan Sinjai Timur, 1 Kelurahan dan 12 Desa
- Kecamatan Sinjai Tengah, 1 Kelurahan dan 10 Desa
- Kecamatan Sinjai Barat, 1 Kelurahan dan 8 Desa
- Kecamatan Sinjai Selatan, 1 Kelurahan dan 10 Desa
- Kecamatan Sinjai Borong, 1 Kelurahan dan 7 Desa
- Kecamatan Bulupoddo, 7 Desa
- Kecamatan Tellulimpoe, 1 Kelurahan dan 10 Desa

- Kecamatan Pulau Sembilan, 4 Desa yang merupakan wilayah kepulauan.

2. Topografi

Sepanjang tahun, daerah ini termasuk beriklim sub tropis, yang mengenal 2 (dua) musim, yaitu musim penghujan pada periode April-Oktober, dan musim kemarau yang berlangsung pada periode Oktober-April. Selain itu ada 3 (tiga) type iklim (menurut Schmidt & Fergusson) yang terjadi dan berlangsung di wilayah ini, yaitu iklim type B2, C2, D2 & type D3.

Zona dengan iklim type B2 dimana bulan basah berlangsung selama 7-9 bulan berturut-turut, sedangkan bulan kering berlangsung 2-4 bulan sepanjang tahun. Penyebarannya meliputi sebagian besar wilayah Kecamatan Sinjai Timur & Sinjai Selatan .

Zona dengan iklim type C2, dicirikan dengan adanya bulan basah yang berlangsung antara 5-6 bulan, sedangkan bulan keringnya berlangsung selama 3-5 bulan sepanjang tahun. Penyebarannya meliputi sebagian kecil wilayah Kecamatan. Sinjai Timur, Sinjai Selatan & Sinjai Tengah.

Zona dengan iklim type D2, mengalami bulan basah selama 3-4 bulan & bulan keringnya berlangsung selama 2-3 bulan. Penyebarannya meliputi wilayah bag. Tengah Kabupaten Sinjai, yaitu sebagian kecil wilayah Kecamatan Sinjai Tengah, Sinjai Selatan & Sinjai Barat.

Zona dengan iklim type D3, bercirikan dengan berlangsungnya bulan basah antara 3-4 bulan, dan bulan kering berlangsung antara 3-5 bulan. Penyebarannya meliputi sebagian wilayah Kecamatan. Sinjai Barat,

Sinjai Tengah & Sinjai Selatan. Dari keseluruhan type iklim yang ada tersebut, Kabupaten Sinjai mempunyai curah hujan berkisar antara 2.000 - 4.000 mm/tahun, dengan hari hujan yang bervariasi antara 100–160 hari hujan/tahun. Kelembaban udara rata-rata, tercatat berkisar antara 64- 87 persen, dengan suhu udara rata-rata berkisar antara 21,1 C⁰-32,4 C⁰.

3. Keadaan Penduduk

Jumlah penduduk Kabupaten Sinjai, pada tahun 2009 sebesar 236.234 jiwa dengan laju pertumbuhan penduduk 1,59 persen, yang terdiri dari 114.867 jiwa penduduk laki-laki dan 121.367 jiwa penduduk perempuan. Sex ratio sebesar 92 persen artinya setiap 100 penduduk perempuan terdapat 92 penduduk laki-laki. Kepadatan penduduk Kabupaten Sinjai sebesar 265 jiwa per km² dengan Kecamatan Sinjai utara merupakan daerah yang memiliki kepadatan terbesar yaitu 1.279 per km² dan Kecamatan Sinjai Barat dengan kepadatan terendah yakni 167 km². Mata pencaharian penduduk di Kabupaten Sinjai sebagian besar bekerja disektor pertanian dalam arti luas, hal ini ditunjang oleh kondisi wilayah yang merupakan wilayah tiga dimensi yaitu laut/pesisir, dataran rendah dan pegunungan yang pada umumnya potensial untuk pengembangan sektor pertanian.

B. Sumber-sumber PAD dan Non PAD

Adapun sumber-sumber pendapatan pada kabupaten Sinjai dari tabel dibawah ini yang menjelaskan mengenai pendapatan kabupaten Sinjai dari tahun 2011-2015 (dalam miliaran rupiah).

Tabel 4.1
sumber-sumber pendapatan asli daerah Sinjai (2011-2015)

NO	URAIAN	TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)	Persentase
Tahun 2011				
1	Hasil Pajak Daerah	1,904,700,000.00	1,665,266,511.00	87.43 %
2	Hasil Retribusi Daerah	5,447,603,374.00	5,633,393,684.00	103.41%
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah YgDi pisahkan	750,000,000.00e	1,041,286,030.92	138.84%
4	Lain-lain PAD yang sah	7,353,420,000.00	7,549,675,389.88	102.67%
	J U M L A H	15,455,723,374.00	15,889,621,615.80	102.81
Tahun 2012				
1	Hasil Pajak Daerah	2,143,501,600.00	2,229,434,415.00	104.01%
2	Hasil Retribusi Daerah	6,217,347,174.00	6,221,958,758.00	100.07%
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yg Di pisahkan	1,500,000,000.00	1,553,728,230.71	103.58%
4	Lain-lain PAD yang sah	7,667,718,712.00	24,018,949,696.40	313.25%
	J U M L A H	17,528,567,486.00	34,024,071,100.11	194.11%
Tahun 2013				
1	Hasil Pajak Daerah	2,286,462,200.00	2,391,126,140.00	104.58%
2	Hasil Retribusi Daerah	6,584,167,374.00	5,503,329,848.46	83.58%
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yg Di pisahkan	1,400,000,000.00	1,882,217,952.67	134.44%

3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yg Di pisahkan	1,400,000,000.00	1,882,217,952.67	134.44%
4	Lain-lain PAD yang sah	7,403,600,000.00	3,008,247,786.88	40.63%
	J U M L A H	17,674,229,574.00	12,784,921,728.01	72.34%
Tahun 2014				
1	Hasil Pajak Daerah	2,615,300,000.00	2,497,680,923.00	95.50%
2	Hasil Retribusi Daerah	6,874,833,374.00	5,600,802,280,50	81.47%
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yg Di pisahkan	1,400,000,000.00	1,850,170,581.49	132.16%
4	Lain-lain PAD yang sah	7,410,289,593.00	5,235,195,747.34	70.65
	J U M L A H	18,300,422,967.00	9,583,047,251.83	82.97%
Tahun 2015				
1	Hasil Pajak Daerah	2,984,370,000.00	3,035,576,948.00	101.72%
2	Hasil Retribusi Daerah	7,873,429,374.00	7,650,538,343.00	97.17%
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yg Di pisahkan	2,300,000,000.00	2,319,144,577.00	100.83%
4	Lain-lain PAD yang sah	3,060,134,000.00	4,473,839,091.00	146.20%
	J U M L A H	16,217,933,374.00	17,479,098,959.00	107.78%

Sumber :Kantor Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan dan di kantor Dinas Pendapatan Daerah, Kabupaten Sinjai.

Tabel 4.2
sumber-sumber non-pendapatan asli daerah Sinjai (2011-2015)

NO	URAIAN	TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)	Persentase
Tahun 2011				
1	Bagi Hasil Pajak	11,271,664,000.00	12,058,946,912.00	101.25%

2	Sumber Daya Alam	2,150,275,827.00	4,919,136,127.00	201.83%
3	Dana Alokasi	320,860,745,000.00	320,860,745,900.00	100.00%
4	Pendapatan Hibah Dari Pemerintah	1,353,566,000.00	533,558,087.97	5.23%
4	Pendapatan Hibah Dari Pemerintah	1,353,566,000.00	533,558,087.97	5.23%
5	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi & Pemerintah	7,900,116,832.00	10,912,235,657.67	171.12%
6	Bantuan Keuangan	386,537,000.00	469,675,284.98	145.89%
7	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	20,031,450,000.00	25,346,247,823.43	109.68%
	J U M L A H	363,954,354,659.00	364,188,310,135.38	101.31%
Tahun 2012				
1	Bagi Hasil Pajak	33,204,955,481.86	24,433,153,051.00	73.58%
2	Sumber Daya Alam	3,275,366,426.53	2,477,515,474.00	75.64%
3	Dana Alokasi	345,840,897,000.00	345,840,898,000.00	100.00%
4	Pendapatan Hibah Dari Pemerintah	14,839,583,000.00	675,688,565.00	4.55%
5	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi & Pemerintah	8,500,316,902.00	8,601,316,902.00	101.19%
6	Bantuan Keuangan	318,240,000.00	648,832,070.00	203.88%
7	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	27,031,180,000.00	28,922,347,200.00	107.00
	J U M L A H	433,010,538,810.39	411,599,751,262.00	95.91%
Tahun 2013				
1	Bagi Hasil Pajak	33,384,584,480.00	23,926,502,521.00	71.67%
2	Sumber Daya Alam	1,914,846,754.98	859,743,214.00	44.90%
3	Dana Alokasi	341,506,710,000.00	341,500,346,000.00	100.00%
4	Pendapatan Hibah Dari Pemerintah	2,163,993,941.00	2,163,994,000.00	100.00%
5	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi & Pemerintah	8,500,000,000.00	7,384,022,566.00	86.87%

6	Bantuan Keuangan	-	562,763,482.00	-
7	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	-	46,530,484,500.00	-
	J U M L A H	387,470,135,175.98	422,927,856,283.00	117.55%
Tahun 2014				
1	Bagi Hasil Pajak	33,384,584,480.00	24,744,801,908.00	74.12%
2	Sumber Daya Alam	2,294,519,409.00	1,171,858,693.00	51.07%
3	Dana Alokasi	334,354,315,000.00	334,354,315,000.00	100.00%
4	Pendapatan Hibah Dari Pemerintah	106,617,725,165.00	83,242,542,332.00	78.08%
5	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi & Pemerintah	9,775,409,469.00	12,357,425,355.00	126.41%
	J U M L A H	486,426,553,523.00	455,870,943,288.00	89.87%
Tahun 2015				
1	Bagi Hasil Pajak	26,185,550,591.00	24,690,388,425.00	94.29%
2	Sumber Daya Alam	3,092,914,164.00	2,245,259,611.00	72.59%
3	Dana Alokasi	397,120,188,000.00	397,120,193,000.00	100.00%
4	Pendapatan Hibah Dari Pemerintah	58,906,861,000.00	58,606,811,000.00	99.49%
5	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi & Pemerintah	17,759,070,956.00	18,360,182,869.00	103.38%
6	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	59,599,196,000.00	59,780,197,120.00	100.30%
	J U M L A H	562,663,780,711.00	560,803,032,025.00	99.98%

Sumber : Kantor Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan dan di kantor Dinas Kabupaten Sinjai.

Dari Tabel 4.1 Terlihat bahwa ada 4 komponen dasar yang mejadi sumber PAD kabupaten Sinjai yaitu : Hasil Pajak Daerah, Hasil Retribusi

Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah. Hal ini sesuai dengan undang-undang no 22 tahun 1999 yang mengatur Pendapatan Asli Daerah. Dari tabel dapat terlihat bahwa jumlah pendapatan kabupaten Sinjai dari tahun-ketahun mengalami peningkatan dan penurunan. Hal ini disebabkan karena beberapa faktor alam, baik itu bencana alam, kekurangan sumberdaya alam dan lain-lain. Pendapatan terendah terjadi pada tahun 2014 yaitu sekitar Rp 9,583,047,251.83 dan tertinggi terjadi pada tahun 2012 yaitu Rp. 34,024,071,100.11. Data ini menunjukkan bahwa tingkat pengeluaran dan Belanja daerah kabupaten Sinjai mengalami peningkatan. Karena 5 tahun terakhir ini Kabupaten Sinjai melakukan pembangunan secara signifikan untuk memperbaiki infrastruktur pasca bencana banjir pada tahun 2012.

Peningkatan terbesar pendapatan kabupaten Sinjai masih ada pada sektor penerimaan pendapatan non PAD .Adapun penyumbang terbesar penerimaan kabupaten Sinjai masih pada dana alokasi umum . kenyataan ini memberi gambaran bahwa tingkat ketergantungan keuangan kabupaten Sinjai masih sangat tinggi terhadap keuangan pusat. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa tujuan dari undang-undang otonomi daerah mengenai perimbangan dana antara daerah dan pusat berjalan kurang maksimal.

C. Laju Perkembangan Nilai PAD

Salah-satu indikator kemajuan ekonomi di suatu daerah adalah dengan memperhatikan nilai perkembangan PAD di daerah tersebut. PAD

(pendapatan asli daerah) merupakan alat pendeteksi laju kemajuan daerah sebab melalui PAD dapat diketahui seberapa besar nilai perhitungan total produksi atas barang dan jasa yang dihasilkan daerah tersebut dalam satu tahun terakhir. Adanya target yang dibebankan setiap tahun pada sektor penerimaan tertentu merupakan indikasi titik kemampuan potensial yang dimiliki oleh daerah tersebut untuk menghasilkan produk barang atau jasa untuk menunjang pembiayaan daerah. Sedangkan realisasi adalah kemampuan riil yang mampu dicapai oleh suatu daerah dalam upaya menunjang pembiayaan daerah dalam mengembangkan proses pembangunan di wilayah yang bersangkutan.

Jadi titik temu antara realisasi dan target menggambarkan seberapa besar upaya pemerintah daerah berusaha mengejar tingkat penerimaan daerah. Berdasarkan data yang diperoleh di lapangan diketahui bahwa nilai target dan realisasi PAD dan Pendapatan non PAD kabupaten Sinjai berfluktuasi sebagaimana tersaji pada data tabel perbandingan antara target dan realisasi PAD dan Non PAD (dalam miliaran rupiah) untuk periode tahun 2011-2015 adalah sebagai berikut :

Tabel 4.3
Perbandingan antara realisasi dan target PAD dan Non PAD kabupaten Sinjai
(2011-2015)

<i>Pendapatan Asli Daerah</i>				
No	Tahun	Target	Realisasi	Persentase
1	2011	15,455,723,374.00	15,889,621,615.80	102.81%
2	2012	17,528,567,486.00	34,024,071,100.11	194.11%
3	2013	17,674,229,574.00	12,784,921,728.01	72.34%
4	2014	18,300,422,967.00	15,183,849,532.00	82.97%
5	2015	19,217,933,374.00	17,479,098,959.00	107.78%

	Rata-rata	17,035,375,355.00	19,072,312,586.98	111.96%
<i>NON Pendapatan Asli Daerah</i>				
No	Tahun	Target	Realisasi	Persentase
1	2011	363,954,354,659.00	364,188,310,135.38	101.31%
2	2012	433,010,538,810.39	411,599,751,262.00	95.91%
3	2013	387,470,135,175.98	422,927,856,283.00	117.55%
4	2014	486,426,553,523.00	455,870,943,288.00	89.87%
5	2015	562,663,780,711.00	560,803,032,025.00	99.98%
	Rata-rata	446,705,072,575.87	443,077,978,598.68	97%
<i>Pendapatan</i>				
No	Tahun	Target	Realisasi	Persentase
1	2011	379,410,078,033.00	380,077,931,751.18	100.18%
2	2012	450,539,106,296.39	445,623,822,362.11	98.91%
3	2013	405,144,364,749.98	435,712,778,011.01	107.55%
4	2014	504,726,976,490.00	471,054,792,820.00	93.33%
5	2015	578,881,714,085.00	578,282,130,984.00	99.90%
	Rata-rata	463,740,447,930.87	461,030,130,729.63	99.66%

Dari tabel 4.3 Terlihat selama 5 tahun terakhir terdapat tahun dimana target terealisasi bahkan melebihi daripada target. Terdapat tiga perbandingan dari tabel di atas. PAD, NON-PAD dan Pendapatan. Tabel di atas menunjukkan bahwa pergerakan pemerintah Kabupaten Sinjai dalam mengembangkan proses pembangunan sangat signifikan. Tetapi yang menjadikan pemasukkan utama kabupaten Sinjai ada di sektor NON-PAD. Oleh karena itu, pemerintah tidak sepenuhnya bergantung pada bantuan dari pemerintah pusat.

D. Kontribusi Pendapatan asli Daerah Terhadap Belanja Daerah Kabupaten Sinjai

Seluruh pendapatan daerah yang diperoleh baik dari daerahnya sendiri maupun bantuan dari pemerintah pusat akan digunakan untuk membiayai seluruh pengeluaran daerah itu. Sedangkan pendapatan asli

daerah merupakan sumber pembiayaan yang paling penting dalam mendukung kemampuan daerah dalam menyelenggarakan otonomi daerah. Salah satu indikator untuk melihat keadaan otonomi suatu daerah terletak pada besar kecilnya kontribusi daerah tersebut dalam PAD untuk membiayai belanja daerahnya sendiri. Untuk menghitung kontribusi pendapatan asli daerah terhadap belanja daerah dapat dilakukan dengan cara :

$$\text{Kontribusi PAD terhadap belanja daerah} = \frac{\text{PAD}}{\text{APBD}} \times 100\%$$

Kontribusi PAD terhadap belanja daerah Kabupaten Sinjai dalam periode tahun 2011-2015 dapat dilihat pada tabeli berikut ini :

Tabel 4.4
Kontribusi PAD Terhadap Belanja Daerah Kabupaten Sinjai

Tahun	PAD (Rp)	Belanja Daerah (Rp)	Kontribusi PAD terhadap belanja daerah (%)
2012	17,528,567,486.00	3.127.363.165.158	25,89
2013	17,674,229,574.00	3.637.069.260.868	24,98
2014	18,300,422,967.00	3.753.710.413.891	50,26
2015	19,217,933,374.00	4.299.150.223.081	53,02

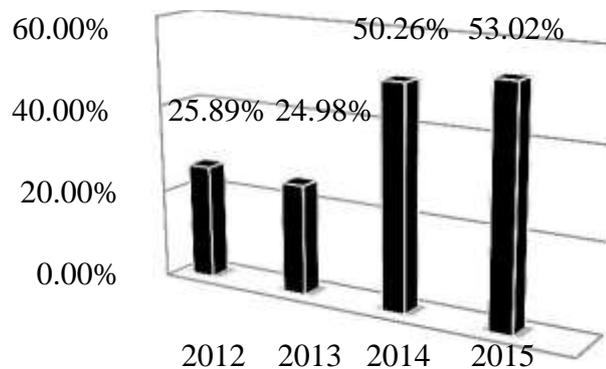
Sumber : laporan Realisasi APBD tahun 2012 s/d 2015

Pada tahun 2012 PAD yang telah dicapai sebesar Rp. 17,528,567,486.00 dan belanja daerah sebesar Rp. 3.127.363.165.158 kontribusi PAD terhadap belanja daerah sebesar 25,89% dan terjadi penurunan pada tahun 2013 dengan nilai PAD dan belanja daerah yang sedikit naik tidak membuat presentase kontribusi PAD ikut naik. Kontribusi

PAD pada tahun 2013 adalah yang paling kecil dari periode waktu 2012-2015 yaitu hanya sebesar 24,98%.

Hasil yang didapat pada periode 2012-2013 jelas tidak maksimal, keadaan ini menuntut adanya perhatian yang sungguh- sungguh dari segenap aparat terkait untuk melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi PAD dan pada tahun 2014 kinerja pemerintah mulai terlihat dengan meningkatnya kontribusi PAD yang dapat membiayai belanja daerahnya hampir setengah dari total belanja daerah.

PAD pada tahun 2014 mencapai Rp. 18,300,422,967.00 dan total belanja daerahnya sebesar Rp. 3.753.710.413.891 ini menunjukkan kontribusi PAD nya sebesar 50,26%. Meskipun belum bisa menutupi semua total belanja daerah tetapi kontribusi PAD sudah mulai mengalami peningkatan. Pada tahun 2015 dengan PAD yang didapat sebesar Rp. 16,217,933,374.00 dan belanja daerah sebesar Rp. 4.299.150.223.081 .Kontribusi PAD pada tahun 2015 adalah yang terbesar bila dibandingkan dengan 3 tahun sebelumnya, pada tahun ini kontribusinya mencapai 53,02%. Dan untuk lebih jelasnya tentang kontribusi PAD terhadap belanja daerah kota Surabaya periode tahun 2012-2015 berikut adalah gambar grafiknya :



- Kontribusi PAD terhadap belanja daerah

Gambar 1
Grafik Kontribusi PAD terhadap Belanja Daerah
Kabupaten Sinjai

Sumber: Laporan Realisasi APBD tahun 2011-2015

Penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa meskipun PAD yang didapat tiap tahunnya mengalami kenaikan tetapi itu tidak berarti kontribusi PAD nya juga akan selalu mengalami kenaikan karena total belanja daerah yang harus dikeluarkan tiap tahunnya juga selalu mengalami peningkatan. Kontribusi PAD rendah dan kurang maksimal terjadi pada tahun 2011-2012 dan pada tahun 2012-2013 kontribusi PAD mengalami kenaikan menjadi >50%. Tetapi dapat dilihat bahwa hasil PAD masih kurang untuk membiayai seluruh belanja daerah, disini daerah dalam memenuhi kebutuhan belanja daerahnya mendapatkan bantuan dari pemerintah pusat yang bersumber dari dana perimbangan berupa bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus juga bersumber dari lain-lain pendapatan yang sah yang dapat berupa dana bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya, dana penyesuaian dan otonomi

khusus, bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya, pendapatan hibah dan bagi hasil lainnya.

E. Produk Domestik Regional Bruto atas Dasar Harga Pasar

PDRB merupakan indikator yang menggambarkan perekonomian penduduk disuatu wilayah /daerah. Ukuran yang dihasilkan dari perhitungan PDRB antara lain adalah rata-rata pendapatan perkapita, struktur ekonomi dan pertumbuhan ekonomi.

PDRB atas dasar harga pasar merupakan penjumlahan nilai tambah bruto dari seluruh sektor perekonomian didalam suatu wilayah dalam periode tertentu, biasanya satu tahun, yang dimaksud dengan nilai tambah adalah selisih nilai produksi dengan biaya antara.

Untuk nilai PDRB kabupaten Sinjai diketahui secara pasti karena ada data nyata mengenai biaya antara yang diperoleh. Data ini diperoleh dari Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan. Kenaikan atau penurunan PDRB merupakan gambaran secara riil tentang kondisi ekonomi yang terjadi di suatu daerah tertentu.

Namun berdasarkan data yang diperoleh PDRB kabupaten Sinjai dengan menggunakan konsep pendekatan total penerimaan diketahui bahwa tingkat pertambahan PDRB setiap tahun selalu meningkat sebagaimana tabel dibawah ini.

Tabel 4.4. PDRB Menurut Lapangan Usaha Di Kabupaten Sinjai Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2012-2015.

Tabel 4.5. PDRB Menurut Lapangan Usaha Di Kabupaten Sinjai Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2012-2015

Sumber: Data Primer yang telah diolah, 2016

Dari tabel 4.4 dan 4.5 diketahui tingkat PDRB dilihat dari harga berlaku dan harga konstan tahun ketahun dari 2012-2015 mengalami kenaikan sehingga bisa dikatakan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Sinjai stabil. Adapun lapangan usaha yang memiliki nilai terbesar yaitu pertanian. Hal ini disebabkan karena keadaan lingkungan di daerah itu cocok untuk pertanian, misalnya cocok untuk pertanian yang digunakan sebagai bahan makanan seperti padi, jagung, dan lain sebagainya.

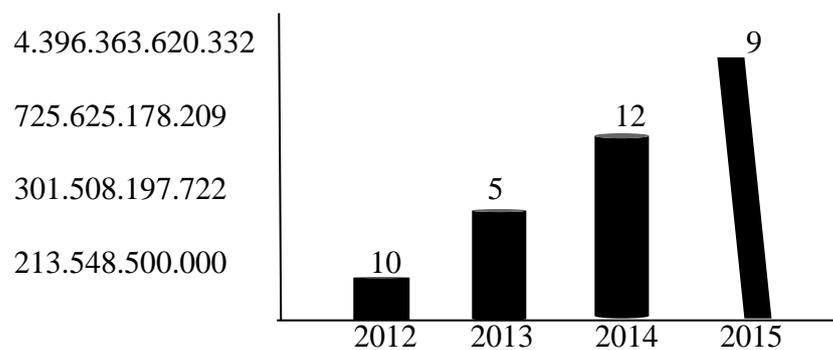
F. Pertumbuhan Investasi Daerah (Penanaman Modal Dalam Negeri)

Penanaman modal merupakan langkah awal kegiatan pembangunan ekonomi. Perubahan laju pertumbuhan investasi tersebut mempengaruhi tinggi rendahnya pembangunan ekonomi di wilayah tersebut. Oleh karenanya, setiap daerah berupaya menciptakan iklim yang dapat menggairahkan investasi tersebut agar masuk ke dalamnya. Berikut adalah data pertumbuhan Penanaman modal dalam negeri (PMDN) Kabupaten Sinjai.

Tabel 4.5
Data Realisasi Investasi PMDN Kabupaten Sinjai

Tahun	Realisasi PMDN		
	Proyek	Investasi (\$)	Investasi (Rp)
2012	10	0	213.548.500.000
2013	5	0	301.508.197.722
2014	12	0	725.625.178.209
2015	9	0	4.396.363.620.332
Total	36	0	5.637.045.496.263

Sumber: Badan Koordinasi Pelayanan dan Penanaman Modal Kabupaten Sinjai.



Gambar 2

- Grafik Badan Koordinasi Pelayanan dan Penanaman Modal Kabupaten Sinjai.

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa investasi PMDN Kabupaten Sinjai dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Pada tahun 2012 dengan proyek berjumlah 10 proyek Kabupaten Sinjai mendapatkan investasi sebesar Rp. 213.548.500.000 nilai yang masih sedikit untuk suatu Daerah seperti Kabupaten Sinjai. Nilai investasi terbesar terdapat pada sektor industri karet, barang dari karet dan plastik dengan hampir sebesar 41,11%. Lokasi yang paling diminati pada tahun ini berada didaerah Sinjai.

Pada tahun 2013 Investasi PMDN naik sebesar Rp. 87.959.697.722

dari tahun sebelumnya sebesar Rp. 213.548.500.000 menjadi Rp. 301.508.197.722 dengan proyek sebesar 5 proyek. Nilai investasi terbesar terdapat pada sektor industri kendaraan bermotor, trailer dan semi trailer sebesar 43,79% dengan lokasi yang paling diminati adalah daerah Sinjai Selatan, Tengah dan Barat. Sedangkan pada tahun 2014 dengan jumlah proyek yang paling banyak dari periode tahun 2012-2015 yaitu sebanyak 12 proyek, jumlah investasinya juga mengalami peningkatan yang cukup banyak yaitu sebesar Rp. 725.625.178.209 dengan nilai investasi terbanyak terdapat pada sektor industri karet, barang dari karet dan plastik dan lokasi yang paling diminati berada didaerah karangpilang.

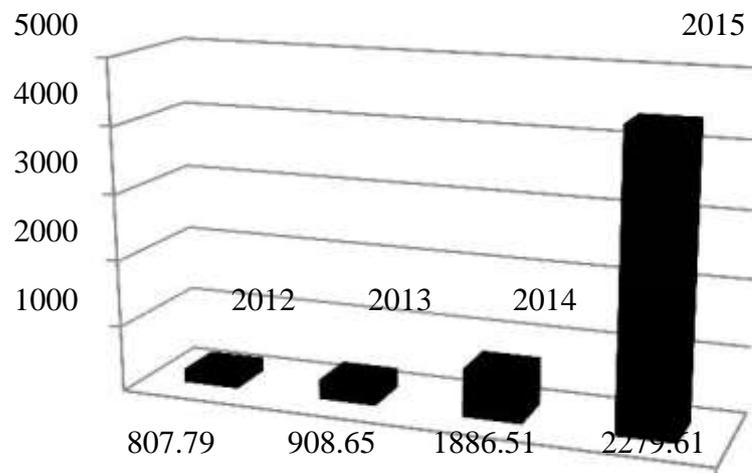
G. Kontribusi PAD terhadap Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) Kabupaten Sinjai

Dari data diatas dapat diketahui bagaimana kontribusi PAD terhadap investasi daerah khususnya investasi PMDN Kabupaten Sinjai. Berikut ini adalah tabel dan grafiknya.

Tabel 4.6
Tabel Kontribusi PAD terhadap PMDN

Tahun	Kontribusi PAD terhadap PMDN PAD
2012	807.79
2013	908.65
2014	1886.51
2015	2279.61
Total	5882.5

Tabel Kontribusi PAD terhadap investasi daerah (PMDN)



- Kontribusi PAD terhadap investasi daerah (PMDN) dalam miliar rupiah

Gambar 3

Grafik Kontribusi PAD terhadap Investasi Daerah (PMDN)

Sumber: Badan Koordinasi Pelayanan Penanaman Modal Kabupaten Sinjai

Dari hasil data tersebut dapat disimpulkan bahwa investasi daerah sangat perlu dilakukan untuk membantu pertumbuhan perekonomian daerah. Salah satu faktor yang mempengaruhi investasi daerah adalah tingkat pendapatan daerah, dalam hal ini salah satunya adalah pendapatan asli daerah. Disini dapat dilihat kontribusi pendapatan asli daerah terhadap investasi daerah terutama pada penanaman modal dalam negeri. Tingkat pendapatan asli daerah yang tinggi akan menjadikan suatu daerah tersebut mengalami peningkatan kemampuan keuangan daerah karena salah satu indikator untuk melihat keadaan otonomi suatu daerah terletak pada besar kecilnya kontribusi daerah tersebut dalam PAD. Daerah yang memiliki kemampuan keuangan yang baik dan dapat melaksanakan otonomi daerah dengan baik pula maka akan menarik perhatian para investor untuk

menanamkan modalnya di daerah. Hal ini jelas akan meningkatkan iklim investasi di daerah. Ini terbukti dalam gambar 2, peningkatan PAD dalam setiap tahunnya, investasi PMDN yang terjadi di Kabupaten Sinjai juga mengalami peningkatan pada tiap tahunnya.

Untuk mempertahankan dan meningkatkan hasil yang telah dicapai pemerintah telah berupaya meningkatkan kinerjanya dalam peningkatan investasi di Kabupaten Sinjai selain terus meningkatkan pendapatan daerahnya untuk menarik investor, pemerintah juga terus berupaya memikirkan faktor-faktor lain yang mempengaruhi investasi seperti mempermudah perijinan, menjaga stabilitas politik dan keamanan, meningkatkan kualitas SDM, dll sehingga iklim investasi di Kabupaten Sinjai dapat stabil dan selalu meningkat .

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan data yang diperoleh Dari Hasil Penelitian dapat disimpulkan bahwa :

1. Nilai perolehan PAD kabupaten Sinjai selalu mengalami peningkatan selama lima terakhir, hal ini dibuktikan dengan proses pembangun kabupaten sinjai yang pesat. Walaupun sumber pendapatan yang mendominasi adalah Non-PAD.
2. Secara keseluruhan nilai PAD Sinjai hanya menyumbang rata-rata 4% tiap tahun terhadap total penerimaan, ini berarti keuangan kabupaten Sinjai sangat bergantung pada keuangan pusat.
3. Secara keseluruhan nilai PDRB atas dasar harga konstan maupun atas dasar harga berlaku kabupaten Sinjai tiap tahun mengalami peningkatan dengan laju peningkatanekonomi tertinggi terjadi pada tahun 2015.
4. Untuk sektor pertanian secara umum penyumbang terbesar terhadap perolehan PAD dan sub sektor perikanan penyumbang terbesar ketiga, dengan demikian dapat dikatakan bahwa sub sektor perikanan memberi sumbangsih $\pm 30\%$, artinya perikanan punya potensi menjadi sumber penerimaan yang diandalkan di kabupaten Sinjai.

B. Saran

Sebaiknya bekal yang diberikan oleh dosen atau asisten dosen harus lebih jelas dan mudah dimengerti oleh mahasiswa agar data yang diambil di tempat tujuan tidak kurang ataupun salah. Sehingga dalam mempresentasikan hasil olahan data tidak salah sehingga pembuatan laporan mudah dalam mengerjakan.

DAFTAR PUSTAKA

Heriyanto, 2003. *Teori dan Aplikasi Teori Ekonomi Makro*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.

<http://www.jurnalskripsi.com/perencanaan-pajak-melalui-metode-penyusutan>. Diakses 5 Maret 2012.

<http://www.Jurnalskripsi.com/11/01/persepsi-konsumen-terhadap-penjualan-barang-mewah>. Diakses : 6 Maret 2012

<http://www.sinjai.go.id/sinjai.html> diakses :25 Maret 2012

<http://reviewtesis.Blogspot.com/2008/02/peranan-pendapatan-asli-daerah-html/>. Diakses : 6 Maret 2012

<http://www.wikipedia.org.com/peranan-PAD-untuk-pembangunan-daerah>. Diakses: Tgl 7 Maret 2012. Makassar.

http://ekonomimikro\ekonomiindonesia\Tempointeraktif_Com-Ekonomi-ndonesia. Diakses : Tgl 7 Maret 2012. Makassar.

Mubyarto. 2004. *Ekonomi pertanian*. LP3S. Jakarta

Putong, Iskandar 2003. *Pengantar Ekonomi Mikro & Makro*. Ghalia Indonesia : Jakarta

Soekartawi, 2003. *Teori Ekonomi Produksi* . UI Press: Jakarta

RIWAYAT HIDUP



Assir Arafah, lahir di Sinjai tanggal 09 Maret 1994 anak dari pasangan Ayahanda Mustar dan Ibunda Naidah, S.Pd. Penulis merupakan anak ke dua dari tiga bersaudara. Jenjang pendidikan yang telah ditempuh penulis adalah di SD Negeri 171 Tellang Sinjai Selatan pada tahun 2001-2006. Pada tahun 2007-2009 penulis melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 2 Sinjai Tengah dan melanjutkan pendidikan ke jenjang menengah atas di SMA Negeri 1 Sinjai Tengah pada tahun 2009 sampai tahun 2012. Cita-cita penulis sejak kecil untuk menjadi tenaga pendidik diridhoi oleh Allah SWT dengan meluluskan penulis di Program Studi Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan Universitas Muhammadiyah Makassar pada tahun 2012.